



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN APRIL 2018

Pendahuluan

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Korporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 30 April 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 799 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

Kategori Berkas Kasus									Total
Berkas Kasus Baru 1x				Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	File	Perwakilan	PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	
41	9	192	68	269	56	1	93	70	799

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	7	22	Kalimantan Tengah	8
2	Sumatera Utara	95	23	Kalimantan Timur	8
3	Bengkulu	5	24	Kalimantan Utara	1
4	Jambi	12	25	Gorontalo	
5	Riau	20	26	Sulawesi Selatan	17
6	Sumatera Barat	37	27	Sulawesi Tenggara	7
7	Sumatera Selatan	24	28	Sulawesi Tengah	14
8	Lampung	7	29	Sulawesi Utara	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	30	Sulawesi Barat	2
10	Kepulauan Riau	4	31	Sulawesi Selatan Barat	
11	Banten	19	32	Maluku	45
12	Jawa Barat	59	33	Maluku Utara	1
13	DKI Jakarta	158	34	Papua	5
14	Jawa Tengah	35	35	Papua Barat	1
15	Jawa Timur	59	36	Tanpa Alamat	20
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	11	37	Brunei Darussalam	1
17	Bali	3	38	Inggris	2
18	Nusa Tenggara Barat	9	39	Irlandia	1
19	Nusa Tenggara Timur	11	40	Italia	1
20	Kalimantan Barat	70	41	Malaysia	1
21	Kalimantan Selatan	9		Jumlah	799

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Pemantauan dan penyelidikan	445
2	Mediasi	66
3	Tim	1
4	File	287
	Jumlah	799

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	371
2	Tembusan	419
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	9
Jumlah		799

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	76
2	Pos	648
3	Fax	2
4	Email	49
5	Online	12
6	Audiensi	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	11
8	Jejaring	
Jumlah		799

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	27
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
3	Hak mengembangkan diri	6
4	Hak memperoleh keadilan	329
5	Hak atas kebebasan pribadi	11
6	Hak atas rasa aman	40
7	Hak atas kesejahteraan	294
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	8
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	1
12	Non HAM	80
Jumlah		799

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	12
Lingkungan hidup	15
	27
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	6
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	254
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	20
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	45
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	9
	328
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	7
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	1
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	11
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	2
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	7
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	10

Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	3
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	11
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	7
	40
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	15
Hak atas kepemilikan tanah	147
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	49
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	17
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	58
Hak atas kesehatan	4
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
	294
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	6
	8
IX. Hak perempuan	
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
	1
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	1
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	2

XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	1
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	81
Jumlah Seluruh	799

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Korporasi	1
2	Lembaga pendidikan	6
3	Individu - Orang seorang	451
4	Individu - Anak	9
5	Individu - Perempuan	12
6	Individu - Buruh migran	3
7	Individu - Pekerja/Profesi	31
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	1
9	Individu - LGBT	1
10	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
11	Individu - Lansia	1
12	Individu - Narapidana	4
13	Kelompok - Masyarakat	173
14	Kelompok - Buruh Migran	1
15	Kelompok - Pekerja	22
16	Kelompok - Masyarakat Adat	11
17	Kelompok - Ras dan Etnis	2
18	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
19	Kelompok - LGBT	4
20	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
21	Kelompok - Narapidana	2
22	Organisasi	1
23	Warga Negara Asing (WNA)	8
24	Tanpa Keterangan Pihak Korban	46

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	
1	Pemerintah pusat (kementrian)	68
2	Pemerintah daerah	96
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (non kementerian)	12
5	Lembaga peradilan	52
6	POLRI	284
7	TNI	18
8	Kejaksaan	20
9	Lembaga Pemasarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	6
10	Pemerintah negara lain	3
11	Korporasi	115
12	BUMN/BUMD	22
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	18
15	Individu - Orang seorang	15
16	Individu - Pekerja/Profesi	11
17	Kelompok - Masyarakat	7
18	Kelompok - Pekerja	1
19	Organisasi	2
20	Warga Negara Asing (WNA)	1
21	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	46

Jakarta, 3 Mei 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim